2355-5726 (Print)
2580-0027 (Online)
: http://dx.doi.org/10.25157/ja.v12i1.17694

Eksplorasi Potensi Kemaritiman Kabupaten Pangandaran: Perspektif Sosio-Budaya dan Ekonomi dalam Rentang Waktu 2012-2024

Sarah Setianingsih [1]*, Leli Yulifar [2]
[1, 2] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Email *Correspondent*: sarahsetianingsih@upi.edu [1*]
Article history: Submit 2025-01-11 | Accepted 2025-02-13 | Published 2025-04-20

Abstrak

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), terbentuk pada 2012. Pembentukan DOB ini dilatarbelakangi keinginan masyarakat untuk maju dan berkembang dalam berbagai aspek. Wilayah ini dinilai mampu menjadi suatu DOB dikarenakan potensinya yang besar, terutama dalam bidang ekonomi. Penelitian bertujuan melihat awal mula Pangandaran menjadi DOB, kondisi sosial budaya ekonominya dan eksplorasi potensi kemaritiman yang ada didalamnya. Dengan menggunakan metode historis, meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, penelitian mencoba menggambarkan bagaimana potensi kemaritiman dalam perspektif sosio-budaya ekonomi. Melalui perspektif tersebut, disimpulkan bahwa Kabupaten ini memiliki potensi besar di bidang kemaritiman khusunya dalam aspek sosio-budaya ekonomi. Namun pengelolaannya belum maksimal, terlihat dari pendapatan ekonominya yang belum cukup besar dan masih cenderung fluktuatif. Sebagai DOB, Kabupaten ini belum mampu melakukan pemanfaatan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, perlunya perhatian, pemanfaatan, dan pengelolaan yang baik. Penelitian merekomendasikan perlunya menumbuhkan kesadaran terkait pemanfaatan potensi kemaritiman dan harus dikembangkan serta dikelola dengan tepat, demi mensejahterakan masyarakatnya.

Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran, Potensi Kemaritiman

Abstract

Pangandaran Regency is a New Autonomous Region (DOB) that was formed in 2012. The formation of this DOB was motivated by the desire of the community to advance and develop in various aspects. This region is considered capable of becoming a DOB because of its great potential, especially in the economic sector. The research aims to look at the beginning of Pangandaran becoming a DOB, its socio-cultural economic conditions and the exploration of maritime potential in it. By using the historical method, including heuristics, criticism, interpretation and historiography, the research tries to describe how maritime potential in the socio-cultural economic perspective. Through this perspective, it is concluded that this Regency has great potential in the maritime sector, especially in the socio-cultural economic aspect. However, its management has not been maximised, as seen from its economic income which is not large enough and still tends to fluctuate. As a DOB, this Regency has not been able to optimally utilise its potential. Therefore, it needs attention, utilisation, and good management. The research recommends the need to raise awareness regarding the utilisation of maritime potential and must be developed and managed appropriately, for the welfare of the community.

Keywords: New Autonomous Region, Pangandaran Regency, Maritime Potential

PENDAHULUAN

Pada awalnya Pangandaran merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang kemudian mengalami pemekaran dan ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 25 Oktober 2012. Hal tersebut selanjutnya diatur oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012. Pemekaran ini didorong oleh aspirasi masyarakat bertumbuh dan berkembang di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Seperti disampaikan ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran", 2012), Kabupaten ini resmi menjadi DOB, karena adanya aspirasi dari masyarakatnya yang

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

memandang perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta melihat tingkat kesejahteraan dan beban tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, pembentukan ini bertujuan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, serta kemampuan memanfaatkan potensi daerah guna pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai sebuah Kabupaten, Pangandaran memiliki potensi yang besar terutama potensi maritim di bidang pariwisata bahari. Hal ini dicanangkan dalam visinya, yaitu "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia". Kemaritiman merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan laut meliputi sumber daya, ekosistem, berbagai aktivitas seperti perikanan laut, batas laut, wisata bahari, industri laut, dsb. Basri, (2023), mendefinisikan negara maritim yang sesuai untuk Indonesia adalah sebuah negara yang mampu membangun kekuatan maritim (*seapower*) dalam bidang pelayaran dan perdagangan (*merchant fighting instruments*), serta kemajuan teknologi kemaritiman (*maritime technology*) untuk secara sinergis memanfaatkan potensi laut dan darat dalam kerangka dinamika geopolitik demi mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bangsa dan negara. Sumber daya sektor kelautan sangatlah besar. Hal ini seharusnya menjadi input produksi bernilai guna agar dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Kemaritiman tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya laut dan warisan budaya, namun terkait dengan kepentingan-kepentingan lainnya, seperti perdagangan, teknologi pertahanan dan sebagainya yang ikut berperan dalam sektor maritim (Basri, 2023). Dengan demikian, potensi kemaritiman harus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, potensi Pangandaran jelas tidak hanya dalam bidang pariwisata saja yang merupakan salah satu bagian dari terpentingnya. Namun lebih dari itu, sebagai wilayah maritim yang memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi, dan sosio-budaya. Menurut (Basri, 2023), potensi ekonomi dan perdagangan maritim dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, terutama sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi lepas laut, kehutanan pesisir, perdagangan, pelayaran, dan pariwisata. Selain dalam sektor ekonomi, Pangandaran memiliki potensi maritim besar dari aspek sosio-budaya. Budaya masyarakat maritim menjadi salah satu potensi besar yang mendorong kemajuan wilayah tersebut, termasuk hubungan manusia dan laut yang mempengaruhi berbagai aspek. Dengan potensi wisata yang besar, dan banyak didatangi wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara, hal ini menimbulkan akulturasi budaya, interaksi sosial dan berbagai organisasi sosial di lingkungan masyarakat.

Kabupaten Pangandaran, yang terletak di pesisir selatan Jawa Barat, memiliki potensi kemaritiman sangat besar. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut berlimpah, menjadikan daerah ini memiliki peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global yang semakin mengedepankan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, eksplorasi potensi kemaritiman di Pangandaran menjadi sangat relevan.

Kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin meningkat di seluruh dunia. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, harus mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut mereka dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Pangandaran, dengan kekayaan sumber daya lautnya, memiliki peluang menjadi model pengembangan kemaritiman yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan ini mencakup pengembangan sektor pariwisata berbasis laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta konservasi ekosistem laut yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, potensi kemaritiman di Pangandaran tidak hanya penting untuk memahami kondisi saat ini, tetapi juga merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional. (cc) BY-SA

lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Kabupaten Pangandaran, memiliki potensi kemaritiman melimpah (Sukmawan, & Sihabudin, 2022), keanekaragaman hayati dan budaya ke arah pelestarian dan pembangunan sustainable (Bakti, et al., 2018), pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Lutfi, 2024), potensi energi laut dan kelimpahan klorofil-a tertinggi (Aurelia, et al., 2019). Meskipun telah banyak penelitian, namun masih ada ketimpangan seperti karya (Nugraha, 2017), membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat, dampak setelah Kabupaten ini menjadi DOB, ekspektasi masyarakat setelah menjadi DOB, dan realisasinya. Penelitian selanjutnya (Sahara, 2024) mengkaji tentang perkembangan, pengelolaan, tantangan dan potensi perencanaan strategis masa depan.

Kebaharuan penelitian ini yakni mengeksplorasi potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran dari perspektif sosio-budaya dan ekonomi dalam rentang waktu 2012-2024. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini menganalisis bagaimana pengembangan sektor kemaritiman berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Aspek sosio-budaya memiliki peranan krusial dalam interaksi masyarakat dengan lingkungan laut, yang dapat mempengaruhi cara hidup, tradisi, dan identitas budaya mereka. Dalam konteks kemaritiman, interaksi ini mencakup berbagai praktik sosial dan budaya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Misalnya, tradisi penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk pola konsumsi dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, aspek sosio-budaya juga mencakup nilai-nilai dan norma yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan serta dalam ritual dan tradisi yang berkaitan dengan laut. Dengan, memahami aspek sosio-budaya dalam konteks kemaritiman sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga menghormati dan melestarikan tradisi serta identitas budaya masyarakat pesisir. Ini menjadi landasan bagi pengembangan strategi yang berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi kemaritiman di Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini berfokus pada segi potensi maritim Pangandaran terkait ekonomi dan sosial-budaya. Manfaatnya untuk menimbulkan kesadaran akan potensi maritim yang ada. Agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai ialah kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan potensi kemaritimannya yang mempengaruhi keadaan sosial-budaya ekonomi. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika potensi kemaritiman serta rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan program-program pengembangan yang berkelanjutan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode sejarah, dimana terdapat beberapa prosedur dalam melakukan penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam (Abdurahman, 2011) metode penelitian sejarah ialah seperangkat kaidah dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, melakukan penilaian secara kritis, serta mengajukan penggabungan dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Tahapan metode sejarah terdiri dari **heuristik**, merupakan kegiatan mencari sumber-sumber, data penelitian, berbagai referensi yang sesuai dengan fokus yang dikaji. Dalam hal ini penulis mencari sumber baik itu buku, artikel jurnal, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan landasan terbentuknya Kabupaten Pangadaran, kemaritiman, potensinya, dan juga data statistik ekonomi, sosial budaya. **Kritik sumber** sebagai upaya melihat, menilai, menganalisis sumber yang telah diperoleh. Kritik ini terbagi menjadi kritik eksternal yang merupakan pengujian keaslian sumber dan kritik internal yang ditujukan untuk menguji kredibilitas sumber. Sebelum dijadikan rujukan, sumber yang telah didapat

(cc) BY-SA Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

dilihat, dianalisis, dan dipastikan dengan baik kredibilitasnya. Hal ini ditujukan agar sumber yang dipilih sesuai dengan fakta yang ada dan akan digunakan dalam pengkajian terkait eksplorasi potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran dari aspek sosio-budaya ekonomi. Selanjutnya **interpretasi** yang merupakan kegiatan mencari keterhubungan fakta untuk memahami makna yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis mencoba menginterpretasikan dan menghubungkan fakta-fakta dan data dari sumber yang diperoleh terkait Kabupaten Pangandaran, baik dari data statistik sosial budaya ekonomi, pembahasan tentang kemaritiman, dan lain sebagainya. Setelah itu **historiografi** atau penulisan sejarah, historiografi ini merupakan tahapan akhir, hasil penelitian disusun sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Pada tahapan ini penulis menguraikan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta yang telah ditemukan menjadi sebuah artikel yang berjudul ”Eksplorasi Potensi Kemaritiman Kabupaten Pangandaran: Perspektif Sosio-Budaya dan Ekonomi dalam Rentang Waktu 2012-2024”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kabupaten Pangandaran Menjadi Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Pangandaran diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012. Pangandaran sendiri berasal dari nama salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Pembentukan Kabupaten Pangandaran ini telah melalui proses yang panjang. Wacana tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran telah muncul sejak lama, namun kemudian muncul kembali setalah terjadinya tsunami di pantai Pangandaran pada tahun 2006. Tsunami menerjang Pangandaran yang berada di kawasan pantai terjadi pada hari Senin 17 Juli 2006. Gempa yang berpusat pada kedalaman 33 KM ini disertai lima kali gempa susulan pada sore hari yang berkisar antar 5 sampai dengan 7 skala richter. Sejak peristiwa tersebut masyarakat kembali memperjuangkan untuk pembentukan DOB yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya keinginan untuk :

1) Mendekatkan layanan publik
2) Mengelola potensi daerah yang belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Ciamis
3) Membuka lapangan pekerjaan
4) Mensejahterakan masyarakat
5) Melakukan penataan wilayah
6) Meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan ("Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39. A Tahun 2016 tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat," 2016).

Perkembangan wilayah atau pemekaran biasanya terjadi karena masyarakat di daerah tersebut ingin maju dan berkembang dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, yang dilihat dari segi geografis. Perkembangan daerah ini menjadi dasar pembentukan wilayah otonom baru dari daerah asalnya. (Nugraha, 2017). Perjuangan untuk membentuk DOB ini diawali pergerakan beberapa organisasi masyarakat yang kemudian bergabung untuk menjadi suatu tim dalam Panitia Pembentukan Kabupaten Pangandaran (P2KP). Pada 10 Juli 2007 panitia tersebut kemudian berubah menjadi presidium pembentukan Kabupaten baru yang diketuai oleh H Supratman, B.Sc. Hingga pada 17 Juli 2007, H. Supratman selaku ketua presidium membacakan naskah deklarasi terkait pembentukan Kabupaten baru dihadapan ribuan masyarakat dari 10 Kecamatan di wilayah Ciamis Selatan. Naskah tersebut menyatakan tekad dari masyarakat 10 Kecamatan untuk membentuk pemerintahan Kabupaten sendiri berpisah dari Kabupaten Ciamis, hal-hal terkait Undang-Undang pemekaran akan segera diselesaikan.

Untuk lebih jelasnya, dalam ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran", 2012) melalui beberapa tahapan, yakni:

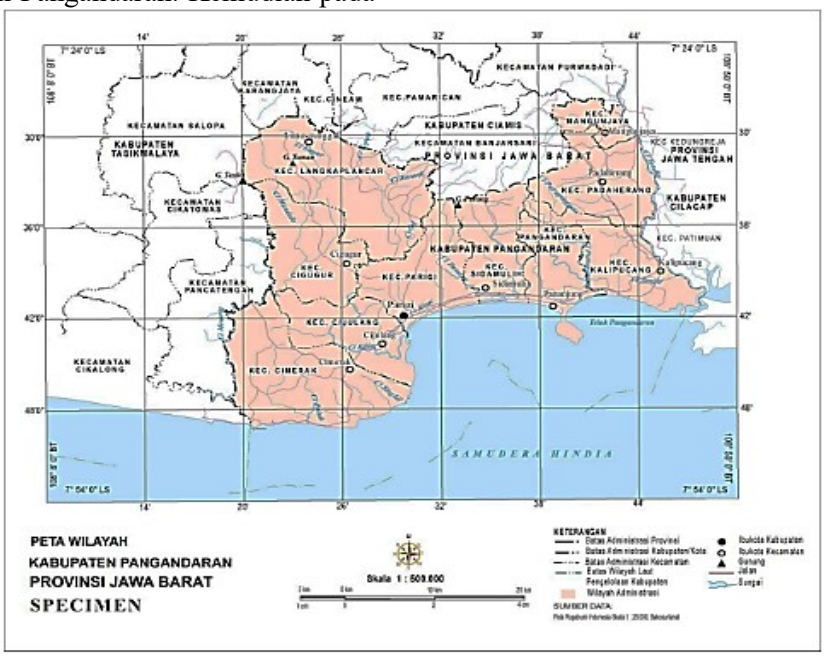
1) Tingkat masyarakat; terbentuknya organisasi-organisasi seperti ”Munding Pakidulan, Awi Kahuripan, Paguyuban Masyarakat Pakidulan, Gabungan Anak Selatan” yang kemudian menjadi ”Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran”.
2) Tingkat Kabupaten induk dalam hal ini Kabupaten Ciamis; Setelah dibacakannya deklarasi tentang Pembentukan

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

Kabupaten Pangandaran, selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen oleh wakil dari 92 Desa. Dokumen tersebut menjadi berkas yang kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis. Pada Agustus 2008 dilakukan pengkajian daerah tentang kelayakan Kabupaten Pangandaran. Sekitar tahun 2008, presidium memimta bantuan akademisi dari Unpad dan Unigal untuk melakukan pengkajian akademis pemisahan Pangandaran dari Ciamis. Hasilnya wilayah ini dinyatakan layak untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) (Nugraha, 2017). Sehingga pada 6 Februari 2009 Jeje Wiriadinata selaku ketua DPRD Kabupaten Ciamis menyetujui pembentukan Kabupaten Pangandaran.

3) Tingkat provinsi; Setelah disetujui DPRD Kabupaten Ciamis, pembentukan Kabupaten Pangandaran diajukan kepada provinsi Jawa Barat, yang kemudian disetujui DPRD Jawa Barat.
4) Tingkat Komisi II DPR RI (lobi politik); 2010 awal, rencana kerja Komisi II DPR RI memuat pembahasan terkait rencana pembentukan Kabupaten Pangandaran
5) Tingkat mendagri; DPOP, dan DPD (survey dan rekomendasi hasil kajian);
6) Tingkat pemerintah pusat (DPR dan Pemerintah); Pada rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Oktober 2012, rancangan Undang-Undang terkait Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Kemudian pada 16 November 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang kemudian diundangkan pada 17 November 2012.

(Firdaus, 2013) menilai pada masa pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, terdapat alur yang tidak sesuai dengan alur yang sudah tertuang secara normatif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Sebab, pada saat itu kelompok presidium memaksimalkan hak inisiatif DPR dalam proses penyelesaian administrasi di tingkat Provinsi induk, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pemekaran Kabupaten Pangandaran masuk pada Program Legislasi Nasional di tahun 2009, hal ini kemudian memudahkan tahapan-tahapan berikutnya. Disamping hal tersebut, setelah diresmikan menjadi Daerah Otonomi Baru, Kabupaten ini fokus pada penyusunan perangkat daerah, hingga kemudian kepada pembangunan infrastuktur, pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Meskipun pada awalnya mengalami berbagai tantangan, namun pemerintah terus mengupayakan hal tersebut melalui program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Pangandaran
(Sumber: Lampiran UU RI Nomor 21 Tahun 2012)

(cc) BY-SA Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

Berdasarkan ("Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran", 2012). Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan yakni, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih. Luas Kabupaten Pangandaran 168.509 ha dengan luas laut 67.340 ha, dan panjang pantai 91km. Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan :
   - Kabupaten Ciamis : Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Purwadadi
   - Kabupaten Tasikmalaya : Kecamatan Karangjaya dan Kecamatan Cineam
b. Sebelah Barat berbatasan dengan :
   - Kabupaten Tasikmalaya : Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Salopa
c. Sebelah Timur berbatasan dengan :
   - Kabupaten Cilacap Jawa Tengah : Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Patimuan
d. Sebelah selatan berbatasan dengan :
   - Laut Samudera Indonesia

Potensi Maritim dalam Bidang Sosial-Budaya Ekonomi Kabupaten Pangandaran

Pada 22 April 2013 telah dilakukan peresmian Kabupaten Pangandaran di Jakarta dengan H. Endjang Naffandi sebagai pejabat Bupati sesuai dengan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Presiden RI No 48/P/2013. Pada masa awal Kabupaten ini menjadi Daerah Otonomi Baru, dibentuk pemerintahan untuk menyusun kebijakan sedemikian rupa yang dapat memprioritaskan pembangunan, perekonomian, dan peningkatan kualitas di berbagai aspek. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Sebagaimana disampaikan dalam (Barat, 2016) bahwa Pangandaran, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), tentu perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun status otonomi ini tergolong baru, kabupaten ini sudah lama memiliki peran penting dan menjadi kawasan strategis di Jawa Barat. Hal ini terlihat pada kebijakan tata ruang yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Kewilayahan (PKW). Selain itu, sesuai dengan ("Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029," 2010), Wilayah ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) di wilayah pengembangan Priangan Timur, serta menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam hal pengelolaan ekonomi. Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengembangan pariwisata di daerahnya. Diantara 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tiga diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Barat, yakni; Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan Destinasi Pangandaran (Fauzi, Bakhri, & Abdul Aziz, 2019) .

Pada konteks ekonomi, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi ekonomi yang besar termasuk ekonomi maritim. Perikanan menjadi salah satu potensi yang besar bagi ekonomi maritim. Potensi perikanan ini bisa meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Bahkan lebih dari itu, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Sektor perikanan dalam arti yang lebih luas mencakup industri pengolahan hasil perikanan yang nilai investasinya tak kalah besar. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan apabila kemudian sektor perikanan menjadi salah satu spektrum ekonomi maritim yang mampu diandalkan bagi perekonomian nasional (Wahyudin, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, Nugroho, Iwan, dan Danuri dalam (Putra et al., 2022), menyatakan bahwa perikanan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup bangsa. Hal ini berlaku bagi nelayan skala kecil, pembudidaya ikan, dan pelaku ekonomi di sektor perikanan yang harus tetap memperhatikan lingkungan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya. Di Kabupaten Pangandaran, sektor perikanan ini meliputi budidaya ikan, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan. Ikan menjadi sumber pangan yang banyak

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional. (cc) BY-SA

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hal ini menjadi suatu modal awal potensi perikanan. Karena ikan merupakan sumber daya yang bisa diperbaharui dan bisa didayagunakan secara keberlanjutan. Masyarakat di wilayah ini menangkap ikan dengan cara tradisional, hal ini salah satu kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan karena menjungjung tinggi nilai gotong-royong. Ikan yang telah ditangkap kemudian dijual di pelelangan ikan.

Pada industri pengelolaan hasil perikanan, di wilayah sekitar pantai Pangandaran terutama di wilayah pariwisata bahari terdapat banyak restoran yang menyediakan olahan seafood segar untuk kemudian dimasak dan bisa langsung wisatawan nikmati. Selain itu masyarakat ini juga memanfaatkan pengolahan ikan untuk dijadikan ikan asin, dan menjadi salah satu oleh-oleh khas wilayah tersebut, salah satunya ialah ikan asin jambal roti yang menjadi ikonik, merupakan olahan ikan asin berasal dari ikan *manyung* (website Kabupaten Pangandaran,) (https://portal.pangandarankab.go.id/). Di tahun 2012, luas area pemeliharaan ikan ini mencapai luas 44 Ha, terdiri dari tambak, 339 Ha kolam/empang, dan 18,30 Ha sawah. Berdasarkan jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan, hasilnya di tahun 2012 adalah 2.219,91 ton dari perikanan laut, 687,8 ton dari tambak, 2.767,38 ton dari kolam, dan 40 ton dari sawah. Nilai produksi ikan laut yang ditangkap oleh nelayan dan masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencapai 2.220 ton dengan nilai mencapai 43,03 miliar. Ini mencerminkan potensi perikanan yang sangat besar dan harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selain potensi dalam perikanan, Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi sangat besar dalam bidang pariwisata bahari. Pangandaran menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Jawa Barat untuk berlibur dan menikmati keindahan wisata bahari. Namun tidak hanya masyarakat Jawa Barat saja, melainkan wisatawan domestik lainnya hingga wisatawan mancanegara memanfaatkan Pangandaran sebagai salah satu wisata andalan mereka. Indonesia diakui sebagai destinasi wisata global karena memiliki keindahan bawah laut dan pantai yang menarik wisatawan. Kehadiran sektor wisata bahari di Indonesia membawa dampak positif bagi potensi ekonomi berbasis kemaritiman. Pariwisata maritim adalah konsep pariwisata yang sangat terkait dengan lingkungan laut, mencakup aktivitas di pantai, pulau, dan perairan laut, serta berbagai kegiatan rekreasi yang berkaitan dengan laut. Pariwisata ini meliputi rekreasi yang diadakan di area laut, baik di permukaan maupun di bawah air. Wisata bahari menawarkan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menyelam, berselancar, dan memancing di berbagai lokasi di laut. Pariwisata bahari memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik utama.

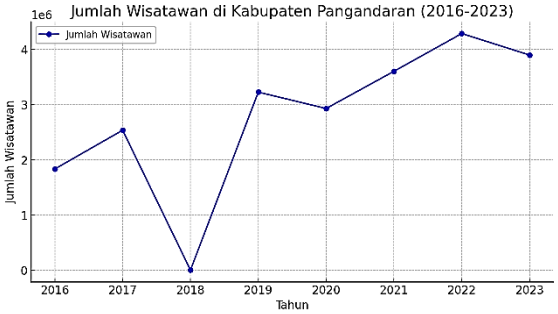
Aktivitas wisata bahari ini memerlukan dukungan, baik itu akses transportasi (udara, darat, dan laut) maupun industri pendukung lainnya, seperti akomodasi (hotel, *guest house*, dan lain-lain), penyediaan makanan dan minuman, termasuk ikan konsumsi yang menarik bagi wisatawan, serta souvenir. Semua aktivitas terkait wisata bahari ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berkontribusi pada peningkatan devisa negara yang penting untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam ("Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," 2009) bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mencakup objek wisata pantai dan sungai. Banyak destinasi unggulan yang menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Contoh beberapa objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran antara lain: Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, serta wisata sungai seperti Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, dan Santirah. Dalam meningkatkan ekonomi pada aspek pariwisata, sudah saatnya masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata yang baik adalah haruslah mementingkan berbagai aspek yang

(cc) BY-SA Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

ada di masyarakat bukan hanya sebatas peningkatan ekonomi semata dan pengelolaan harus berkelanjutan (Muhammad, 2015). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan yang dilakukan harus tetap mementingkan kelestarian alam. Dengan demikian pengelolaan pariwisata yang baik, dapat mendukung untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya selain meningkatkan perekonomian, pengelolaan pariwisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Dalam pengelolaan pariwisata juga diperlukan pengembangan promosi dan marketing yang baik dan menarik untuk mengenalkan pariwisata Kabupaten Pangandaran agar dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing.

Pada konteks sosial budaya, budaya maritim ialah hubungan antara manusia dan laut yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu pembentuk budaya maritim ialah kondisi alam maritim. Hal ini membentuk karakteristik tertentu yang berorientasi maritim seperti keberanian, kerja keras, percaya diri, ulet, gotong royong, berjiwa wirausaha, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Perbedaan kondisi alamiah kehidupan laut dan darat menimbulkan perbedaan karakteristik budaya. Simpul budaya maritim menjadikan laut sebagai ruang yang multifungsi, yaitu sebagai ruang hidup, ruang perjuangan, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolahraga, berkreasi, dan ruang mendidik masyarakat (Hanggarini, Madjid, Perwita, & Wiranto, 2022). Salah satu budaya maritim di Kabupaten Pangandaran ialah tradisi hajat laut yang merupakan agenda tahunan. Upacara tersebut dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur nelayan dan masyarakat kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat melalui laut sebagai sumber penghidupan. Upacara hajat laut yang dilaksanakan dewasa kini berbeda dengan hajat laut pada mulanya. Karena upacara hajat laut saat ini telah berakulturasi dengan masyarakat setempat terutama agama Islam. Hajat laut dewasa kini merupakan perundingan antara pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hajat Laut harus mengandung unsur-unsur keislaman seperti pengajian, tabligh akbar, lantunan doa, dan lain-lain (Heriyawati, Herdiani, & Dimyati, 2020). Hal ini terjadi karena hajat laut dianggap sebagai kegiatan syirik yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Dahulu, tradisi Hajat Laut hanya dilakukan oleh para nelayan untuk keperluan spiritual, namun saat ini perayaan Tradisi Hajat Laut dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk masyarakat luas. Dimana perayaan tradisi ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk wisatawan dari berbagai daerah (Nuraini, Khadijah, & Radiah, 2023). Hajat laut ini bisa dijadikan suatu kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk pariwisata Kabupaten Pangandaran. Harapannya hal tesebut juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Berikut merupakan grafik wisatawan di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.



Gambar 2. Grafik Wisatawan Kabupaten Pangandaran
(Sumber: dokumentasi pribadi 2025)

Data tersebut diperoleh dari web Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terkait jumlah kunjungan ke objek wisata. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara tahun tersebut sebanyak 10.344 orang dan 1.824.367 orang wisatawan domestik. Pada 2017 jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sebanyak 2.536.962 orang. Pada 2018 mengalami penurunan dengan hanya 3.578 orang. Mengalami kenaikan kembali pada 2019 degan 3.227.297 orang. Pada 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 2.930.506 orang. Pada 2021 mengalami kenaikan dengan jumlah 3.604.128. Kemudian pada 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan jumlah 4.288.185 orang. Namun mengalami penurunan kembali di 2023 dengan jumlah wisatawan sebanyak 3.898.575 orang.

Pada 2016 Kabupaten Pangandaran mulai melakukan pemilihan kepala daerah dalam hal ini Bupati dan wakilnya yang

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional. (cc) BY-SA

dilakukan pada 9 Desember 2013. Dalam pilkada tersebut pasangan H. Jeje Wiriadinata dan H. Adang Hadari terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yang menjabat dari tahun 2016-2021. Pada pemerintahannya dibentuk beberapa kebijakan yang menunjang ekonomi dan sosial-budaya Kabupaten Pangandaran. Dengan potensi wisata yang besar, pemerintah Kabupaten Pangandaran mengatur pengelolaan kepariwisataan daerah salah satunya melalui ("Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025," 2018). Beberapa aspek yang menjadi tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, diantaranya pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri kepariwisataan, pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata. Dengan sasarannya yang disampaikan pada Bab IV Pasal 9 yakni:

a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
b. Peningkatan lama tinggal wisatawan
c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan
d. Terwujudnya keseimbangan dan pengembangan kepariwisataan
e. Pengembangan kepariwisataan melalui wisata pedesaan, agrowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam pedesaan dan pertanian

Hal tersebut diterapkan di berbagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), seperti Daerah Pangandaran, Cimerak, Kalipucang-Mangunjaya, Langkaplancar-Cigugur. Dalam perkembangan pariwisata daerah perlu perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainya. Terlebih bagi Kabupaten Pangandaran pariwisata merupakan sektor penting untuk pembangunan daerah. Selain berperan sebagai penggerak ekonomi, pariwisata juga menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada tahun 2016 pendapatannya sebesar Rp.66.285.348,15 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.145.698,86.

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi, sosial-budaya masyarakat di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya sumber daya manusia yang mendukung akan hal tersebut. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga bisa menjadi suatu wadah untuk pengembangan budaya dan karakter. Dengan demikian, Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan terkait pendidikan karakter melalui ("Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran," 2017). Peraturan ini berpedoman kepada nilai keagamaan, kepramukaan, dan budaya lokal. Adanya multikulturalisme yang terbentuk di Kabupaten Pangandaran mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan didalamnya. Dalam nilai keagamaan meliputi program Ajengan Masuk Sekolah, Pangandaran Mengaji, dan Pendidikan Karakter Mulia (non-Islam). Hal ini disesuaikan dengan perbedaan agama yang terbentuk di Kabupaten Pangandaran. Dapat dilihat data statistik penduduk Kabupaten Pangandaran berdasarkan agama di tahun 2020 ialah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penduduk Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Agama di tahun 2020

Agama	Jumlah Penduduk
Islam	242.751
Protestan	279
Katolik	55
Hindu	-
Budha	12
Lainya	2

(Sumber: Pangandaran, 2020)

Sedangkan dalam nilai budaya lokal, meliputi pengembangan sekolah pusat budaya (*cultural center school*), pengembangan budaya sunda, dan apresiasi seni budaya. Hal ini dikembangkan menjadi ekstrakulikuler seni dan budaya yang didalamnya menyinggung budaya lokal, kewirausahaan, pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal. Sekolah menjadi salah satu wadah untuk mengembangan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Untuk apresiasi seni budaya setiap tanggal 25 diperingati sebagai hari budaya sunda dengan kewajiban untuk memakai pakaian adat yang ditentukan. Selain dalam sosial budaya, pemerintah juga menetapkan peraturan terkait ekstrakulikuler yang menunjang

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

kepariwisataan berbasis kearifan lokal, diantaranya ekstrakulikuler bahasa inggris, kulineri, dan kerajinan. Adanya ekstrakulikuler tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik dalam rangka mengusung tercapainya visi misi Kabupaten Pangandaran. Peraturan atau kebijakan tersebut dibuat untuk menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia maritim yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian, adanya pendidikan karakter diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki budi pekerti, sikap, dan perilaku positif yang tidak terpisahkan dengan lingkungannya. Dalam hal ini sesuai dengan cita-cita Kabupaten Pangandaran untuk membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan bisa menyokong Kabupaten Pangandaran yang lebih baik kedepannya, yang dapat memaksimalkan potensi wilayahnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

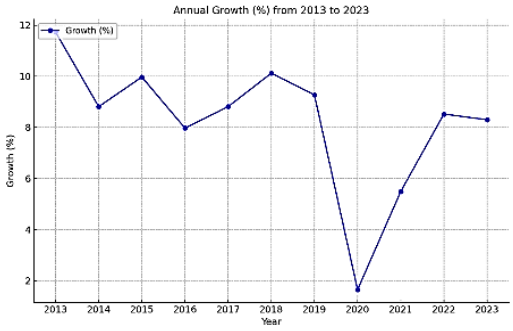
Sebagai Daerah Otonomi Baru, sudah cukup menunjukan bahwa Kabupaten Pangandaran mampu mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan Kabupaten Pangandaran yang cenderung sedikit meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2012-2023

Tahun	PDRB (juta rupiah)	Presentase Kenaikan
2012	5.984.684,64	-
2013	6.686.854,54	11,73%
2014	7.276.111,78	8,81%
2015	8.001.416,97	9,97%
2016	8.639.463,64	7,97%
2017	9.400.780,12	8,81%
2018	10.352.224,38	10,12%
2019	11.311.685,83	9,27%
2020	11.498.234,46	1,65%
2021	12.129.690,95	5,49%
2022	13.163.695,66	8,52%
2023	14.256.419,23	8,30%

Sumber: (Pangandaran, 2017, 2022, 2024)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah nilai tambah bruto suatu barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik tertentu, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto ini dapat mencerminkan pendapatan rata-rata di tahun tersebut, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tabel tersebut, PDRB Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan di setiap tahunnya dengan peningkatan yang tidak cukup besar, namun jika melihat presentase kenaikan dari tahun ke tahunnya cukup fluktuatif. Berikut presentase peningkatannya jika dibuat kedalam grafik.



Gambar 3. Grafik peningkatan PDRB Kabupaten Pangandaran
Sumber : (Dokumen pribadi 2025)

Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan ekonomi Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi. Cukup mengalami sedikit kenaikan di beberapa tahun, namun ada juga yang mengalami penurunan. Dengan hal ini bisa dilihat bahwa sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pangandaran belum melakukan pemanfaatan potensinya dengan cukup optimal. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian potensi kemaritiman masih perlu dijadikan perhatian untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran yang besar terutama dalam aspek sosio-budaya dan ekonomi, Kabupaten Pangandaran masih bisa mengembangkan dan mengelola potensinya dengan lebih maksimal untuk peningkatan perekonomian yang lebih signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional. (cc) BY-SA

KESIMPULAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah maritim yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran memiliki potensi kemaritiman dalam aspek sosial-budaya ekonomi. Hal ini penting untuk disadari oleh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran berdiri untuk mengoptimalkan potensinya demi kepentingan bersama. Kabupaten Pangandaran memiliki pendapatan yang cukup meningkat di setiap tahunnya dan masih fluktuatif, hal ini masih harus diperhatikan, karena nampaknya pemanfaatan potensi ini belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik melalui sumber daya manusia yang berkualitas serta kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk pengoptimalan potensi kemaritiman Kabupaten Pangandaran.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih besar dari daratannya, dan kemaritiman sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakt didalamnya. Dengan demikian, kajian tentang kemaritiman, wilayah maritim, potensi maritim sangat menarik untuk dikaji. Karena dengan hal tersebut dapat memberikan wawasan terkait kemaritiman, seperti dalam hal ini potensi maritim yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Artikel ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam*: Penerbit Ombak.

Aurelia, J. P. P., Zahira, N., Laeliyah, N., Fahrezi, M. R., Syakilah, S. P., & Dewi, S. (2019). Judul Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia Volume & Halaman Vol. 20 No. 1, 2019: Hal. 83-89 Tahun 2019 Penulis Harries Arizonia Ismail, Erawati Kartika Reviewer Irinewati Fajrin, Fitri Nurpujiana, Audina Shofiah, Debby.

Barat, B. P. P. D. J. (2016). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. *Bandung: Bappeda Pemprof Jabar*.

Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230. https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.18459

Basri, D., M. Suryono. (2023). *Pengantar Ilmu Kemaritiman*. Bandung: Widiana Media Utama.

Fauzi, P., Bakhri, S., & Abdul Aziz, A. (2019). Pembangunan Parawista di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 11*(1), 77-94.

Firdaus, E. M. (2013). *Pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Pangandaran provinsi Jawa Barat.* UIN Sunan Kalijaga,

Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective, 7*(2), 164-179.

Heriyawati, Y., Herdiani, E., & Dimyati, I. S. (2020). Kearifan Lokal Hajat Laut Budaya Maritim Pangandaran. *Panggung, 30*(2), 518061.

Lutfi, N. A. D. (2024). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Dalam Mengembangkan Pariwisata Pantai Pangandaran Melalui Industri Ekonomi Kreatif. *Thesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Ekonomi Syariah. Uinsaizu. http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/27217

Muhammad, F. (2015). *Bentuk Pengelolaan Potensi Pariwisata Pantai Pangandaran Jawa Barat.* UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta,

Nugraha, A. S. (2017). *Persepsi Dan Ekspektasi Masyarakat Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran: Studi deskriptif di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.* Universitas Pendidikan Indonesia,

(cc) BY-SA Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

Nuraini, A., Khadijah, U. L. S., & Radiah, S. (2023). Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi Hajat Laut pada Media E-Booklet dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Artefak, 10*(1), 29-42.

Pangandaran, B. P. S. K. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran 2012-2016. Retrieved from https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2017/08/07/3f98224a37830d6ac0680b8d/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-pangandaran-2012-2016.html. https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2017/08/07/3f98224a37830d6ac0680b8d/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-pangandaran-2012-2016.html

Pangandaran, B. P. S. K. (2020). Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2020. Retrieved from https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/3aa1afc640f74adeb926edd7/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2020.html. https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/3aa1afc640f74adeb926edd7/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2020.html

Pangandaran, B. P. S. K. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Retrieved from https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2022/04/05/ff35ac626fd63e74bb4a496b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html. https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2022/04/05/ff35ac626fd63e74bb4a496b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html.

Pangandaran, B. P. S. K. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Retrieved from https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/2c594f51c42cf652a29d3a21/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html. https://pangandarankab.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/2c594f51c42cf652a29d3a21/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pangandaran-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39. A Tahun 2016 tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (2016).

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, (2017).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025, (2018).

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, (2010).

Putra, I. M., Irawan, F., Alifsyah, M., Effendy, M. R., Tanjung, R. N., & Patricia, V. L. T. (2022). Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Kampung Nelayan Sebrang. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 15*(1), 15-34.

Sahara, S. (2024). *Perkembangan Pariwisata Budaya di Pangandaran 2006-2020.* Universitas Siliwangi,

Sukmawan, W., & Sihabudin, A. A. (2022). *Pelaksanaan Pelatihan Tanggap Bencana Kepada Taruna Tanggap Bencana Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran*. http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1017

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, (2009).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran (2012).

Wahyudin, Y. (2016). Potensi Bisnis Kelautan Di Negara Maritim Poros Dunia Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia (The Potency Of Marine Business In The Pivot Maritime

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional. (cc) BY-SA

Country Of The World Toward Indonesian People Welfare).

Website Kabupaten Pangandaran. Retrieved from https://portal.pangandarankab.go.id/.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4. 0 Internasional.